

STRATEGI PELIBATAN DIASPORA INDONESIA DALAM DIPLOMASI PUBLIK

Tonny Dian Effendi

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
tonny@umm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hubungan antara diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam keterkaitannya dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Diaspora Indonesia memiliki tiga potensi penting yaitu jumlah, keahlian dan ekonomi, dan jaringan yang dapat digunakan untuk membantu diplomasi publik Indonesia. Namun, perbedaan definisi antara pemerintah dan kelompok diaspora, masalah representasi pekerja migran dalam kelompok diaspora dan lemahnya aspek kelembagaan membuat optimalisasi keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik belum maksimal. Studi ini adalah penelitian kualitatif di mana analisis konten dilakukan kepada data yang diperoleh dari dokumen berita, artikel dan laporan. Hasil analisis studi ini menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik. Pertama, memperluas hubungan antara diplomasi dan pekerja migran dari hubungan yang bersifat perlindungan menjadi hubungan yang bersifat pemberdayaan. Kedua, hubungan antara Kemenlu dan diaspora Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan dan optimalisasi kelembagaan dengan membentuk lembagakhusus untuk menangani urusan diaspora. Ketiga, menyusun pedoman keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik.

Kata kunci: Strategi, Diplomasi Publik, Diaspora, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the relations between Indonesian government's public diplomacy and Indonesian diaspora. The Indonesian diasporas have three critical potential capacity—population, skill and economy, and network—that may support for public diplomacy. However, the different definition between the government and diaspora groups, representation of migrant worker in diaspora group and institutional aspect may make the diaspora's involvement in the public diplomacy need to be improved. This study is qualitative research with content analysis to the data that are collected from document, news, article and reports. The result shows three strategies that may help to increase the involvement of diaspora in public diplomacy. First, enlarging the relations between diplomacy and migrant workers from the protection to empowerment. Second, institutionalization the relations between MOFA and diaspora groups by establish particular institution or body for diaspora relations. Third, create the guideline for the involvement of diaspora in public diplomacy.

Keywords: Strategy, Public Diplomacy, Diaspora, Indonesia

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan khusus terkait dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 76 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 7 Tahun 2017. Kedua kebijakan ini terkait dengan definisi dan peraturan pemberian Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2017 memuat tentang definisi "Masyarakat Indonesia di Luar Negeri," yaitu orang-orang yang termasuk dalam beberapa kelompok seperti warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan warga negara asing yang meliputi mantan WNI yang tinggal di luar negeri, keturunan dari mantan WNI yang tinggal di luar negeri dan warga negara asing yang orang tua kandungnya adalah WNI. Sedangkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 7 Tahun 2017 memuat tentang beberapa aturan terkait dengan pemberian dan pencabutan kartu MILN serta fasilitas yang diperoleh bagi pemegang kartu tersebut. Kedua kebijakan tersebut menunjukkan usaha pemerintah Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan memberikan dasar hukum dalam hubungan tersebut. Meskipun begitu, dibandingkan dengan dua negara Asia Tenggara yang lain, Filipina dan Vietnam, Indonesia sedikit tertinggal dalam kebijakan terhadap diaspora. Kedua negara telah terlebih dahulu membuat kebijakan dan kelembagaan diaspora sehingga pelibatan diaspora dalam diplomasi publik mereka juga berjalan dengan baik.

Filipina dan Vietnam membangun hubungan dengan diaspora mereka melalui kebijakan dan kelembagaan. Mereka memiliki beberapa kebijakan khusus kepada diaspora mereka yang tinggal di luar negeri dengan membentuk lembaga atau kementerian khusus yang mengurus hubungan dengan diaspora (Camroux, 2008; Chan & Tran, 2011a; Commission of Filipinos Overseas, 2010; The Prime Minister of Government, 2004). Bahkan, diaspora digunakan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri dan dalam negeri seperti misalnya membantu negosiasi kepada negara tempat diaspora tinggal, serta menarik diaspora untuk "pulang" dengan melakukan investasi maupun juga transfer teknologi dan ilmu pengetahuan (Gonzalez, 2011; N. T. T. Ho, Seet, Jones, & Hoang, 2018). Dengan kata lain, diaspora digunakan sebagai bagian dari diplomasi negara-negara tersebut di luar negeri. Sementara itu, meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan khusus kepada MILN, namun dalam konteks kelembagaan, Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang menangani tentang hubungan pemerintah dengan MILN kecuali Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan

Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, studi terhadap kebijakan diaspora Indonesia adalah studi yang relatif baru karena kebijakan diaspora Indonesia yang baru muncul pada tahun 2017. Meskipun begitu, minat para peneliti dan akademisi terhadap isu diaspora dan kebijakan diaspora semakin berkembang.

Sebagian besar penelitian diaspora dan kebijakan diaspora Indonesia berfokus kepada aspek ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Diaspora Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap pembangunan ekonomi (H. Manurung, 2015; Revindo, Indrawati, & Hambali, 2019). Diaspora Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (Riyani & Hanita, 2020; Wibowo, 2015) dan pembangunan sosial di Indonesia (Lestari, 2019; Syauta, 2014). Penelitian-penelitian sosial lainnya membahas tentang kasus diaspora di luar negeri (Aidulsyah & Gusnelly, 2019; Gustina & Prawira, 2020; Martin, 2014; MUNDAYAT, 2016; Putri, 2017). Sementara itu, munculnya diaspora Indonesia mengundang diskusi tentang kewarganegaraan ganda (Charity, 2016; Jazuli, 2017; Rumetor, 2019), namun tampaknya aspirasi ini masih memerlukan perjalanan panjang untuk terealisasi (Dewansyah, 2018) karena memerlukan dukungan politik (Dewansyah, 2021), sehingga kemungkinan untuk saat ini adalah sebuah jalan tengah yaitu quasi dual citizenship dengan kartu diaspora (Harijanti, Dewansyah, Abdurahman, & Dramanda, 2018). Pada aspek politik, beberapa peneliti mengkritisi diaspora Indonesia yang terkesan elitis (Latifa, 2019), pandangan pemerintah Indonesia terhadap diaspora sebagai aset (Harza, Nanda, Dermawan, & Permata, 2019), pelibatan diaspora dalam diplomasi pertahanan (Andayani, 2020; Wibisono, Legionosuko, & Yuninda, 2018), serta partisipasi politik warga negara Indonesia di luar negeri (admin & Shinta, 2019; Effendi, 2021). Perbedaan definisi antara kelompok diaspora dan pemerintah Indonesia menyebabkan permasalahan dalam pendataan dan keanggotaan diaspora (Romdiati, 2015; Setijadi, 2017), serta terbatasnya kebijakan pemberdayaan diaspora (Risman, Sumertha, & Widodo, 2018). Sementara itu, penelitian tentang diaspora dan diplomasi publik didominasi oleh peran diaspora dalam berbagai kegiatan diplomasi publik atau sebagai sebuah studi kasus dalam penelitian (Diahtantri, Fathun, & Ma'arif, 2021; Djuwita, 2020; Effendi, 2016; Kurniawan & Hartoni, 2019; Ramadhan & Khusairi, 2021; Sutantri, 2018). Studi ini mencoba untuk memberikan tambahan pada diskusi diaspora dan diplomasi publik dengan menganalisis strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah

Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik.

Artikel ini mengusulkan tiga strategi pelibatan diaspora dalam diplomasi publik Indonesia. Ketiga strategi tersebut adalah perluasan hubungan dengan pekerja migran dari perlindungan menjadi pemberdayaan, penguatan kelembagaan diaspora dan pembuatan pedoman diplomasi publik bagi diaspora. Artikel ini mendiskusikan gagasan tersebut dalam tiga bagian yaitu hubungan diaspora dan diplomasi publik, kebijakan diaspora pemerintah Indonesia dan strategi pelibatan diaspora dalam diplomasi publik.

Kata diaspora berasal dari Bahasa Yunani 'diasperein' yang terdiri dari dua kata yaitu dia yang berarti melalui atau melampaui dan sperein yang artinya bertaburan atau menyebar (Kenny, 2013). Kata diasperein ini kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang yang bermigrasi dari daerah asal menuju ke negara lain. Orang-orang ini kemudian menetap di negara barunya, namun sebagian diantara mereka masih mempertahankan hubungan dengan negara asal, baik hubungan yang bersifat nyata maupun emosional. Oleh karena itu, hubungan antara diaspora dan negara asal didominasi oleh hubungan etnis, ras atau agama (Dufoix, 2019; Liberatore & Fesenmyer, 2019; Moghissi, 2006; Zeraoui, 2012). Namun, diaspora tidak hanya terkait dengan hubungan yang bersifat budaya, namun juga berkaitan dengan penyebaran ide, seni, dan bahkan gerakan sosial atau politik (Daniel, 2005; Harris, 2005; Hill, 2005; Kenny, 2013; Kim, 2005; Low & Bowden, 2013).

Secara umum diaspora dimaknai sebagai sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari daerah asalnya ke tempat yang baru. Di tempat yang baru tersebut, kelompok ini membentuk sebuah komunitas baru yang berbeda secara identitas dan budaya dengan komunitas lokal (Braziel, 2008), karena mereka masih memiliki ikatan dengan budaya asal mereka (Lahneman, 2005). Oleh karena itu, konsep diaspora sering kali berkaitan dengan konsep lain dalam dua kelompok. **Pertama**, konsep-konsep yang menandakan hubungan dengan negara asal seperti konsep migrasi, migran, pengungsi, eksil dan kelompok etnis. **Kedua**, konsep-konsep yang berhubungan dengan keberadaan mereka di tempat baru seperti konsep expatriat dan kelompok minoritas.

Kelompok diaspora berusaha untuk mempertahankan identitas dan budaya mereka. Mereka berusaha untuk melestarikan identitas dan budaya mereka melalui transfer pengetahuan kepada generasi berikutnya melalui berbagai kegiatan seperti sekolah, media dan organisasi (Mackerras & Maidment, 1998). Organisasi diaspora memegang peran

penting dalam melestarikan identitas dan budaya diaspora, serta sebagai wadah untuk mempertahankan kohesifitas di antara anggota yang memiliki persamaan leluhur atau budaya tertentu. Identitas inilah yang kemudian menjadi penghubung antara kelompok diaspora dengan negara asal melalui kegiatan ekonomi atau budaya (Helly, 2006). Oleh karena itu, identitas membentuk hubungan transnasional, melampaui batas negara, dan pada akhirnya membentuk jaringan diaspora yang biasanya berlandaskan kepada hubungan budaya dan ekonomi.

Thomas Faist membagi diaspora dalam dua kelompok, yaitu diaspora lama dan diaspora baru (Faist, 2010). Perbedaan keduanya didasarkan kepada perbedaan penyebab dan sejarah migrasi. Kelompok diaspora lama bermigrasi karena konflik dan kemudian menjadi pengungsi di daerah baru. Mereka biasanya berkeinginan untuk kembali ke negara asal mereka karena faktor identitas yang kuat, kesulitan beradaptasi di negara baru dan kemungkinan adanya diskriminasi. Sementara itu, diaspora baru bermigrasi karena perdagangan atau pekerjaan. Mereka bermigrasi untuk kepentingan ekonomi, dan sebagian di antara mereka tidak ingin kembali ke negara asal meskipun tetap menjaga hubungan identitas serta relatif mudah beradaptasi dan merasa menjadi bagian dari masyarakat lokal. Meskipun memiliki perbedaan penyebab dan sejarah, namun diaspora lama dan baru memiliki persamaan dalam konteks menjaga hubungan dengan negara asal mereka. Hubungan dengan negara asal ini membentuk jaringan lintas batas negara atau network society (Castells, 1997). Karena melintasi batas negara dan dipengaruhi oleh situasi politik di negara asal dan negara tempat mereka tinggal, network society dapat membentuk identitas politik yang akhirnya menyebabkan adanya tumpang tindih dalam identitas diaspora mereka. Contohnya adalah diaspora Arab di Amerika Serikat yang mungkin memiliki beberapa identitas sekaligus seperti diaspora Arab (etnis), diaspora Irak (negara) dan diaspora Muslim.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, penelitian ini mendefinisikan diaspora sebagai kelompok orang yang melakukan migrasi ke negara lain, namun tetap mempertahankan identitas dan budaya negara asal mereka serta membangun hubungan dengan negara asal melalui jaringan transnasional. Hubungan ini umumnya adalah hubungan budaya, sejarah dan ekonomi. Meskipun begitu, terdapat hubungan politik dalam kasus-kasus tertentu seperti yang terjadi pada diaspora Yahudi, Armenia dan Kurdi. Sementara itu terkait dengan diaspora Indonesia, artikel ini mendefinisikan diaspora dengan mengikut kepada definisi

dari masyarakat Indonesia di luar negeri yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Diplomasi merupakan salah satu kajian inti dalam studi hubungan internasional. Secara sederhana diplomasi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di luar negeri melalui jalinan hubungan dengan negara lain. Diplomasi memuat empat fungsi utama yaitu mediasi, negosiasi, messaging dan talking (Bjola & Kornprobst, 2018). Diplomasi dilaksanakan oleh organ pemerintah yaitu kementerian luar negeri yang dijalankan oleh para diplomat. Meskipun memuat seni hubungan antar negara, diplomasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan profesional diplomat, melainkan juga aktor-aktor non negara yang berada di bawah kontrol aktor pemerintah (Berridge, 2010) termasuk juga individu atau eminent person (Hamilton & Langhorne, 2011).

Dalam hubungan internasional yang semakin kompleks, publik memiliki kesempatan untuk berperan dalam diplomasi sebuah negara. Publik berperan dalam diplomasi dalam dua aspek yaitu sebagai obyek dan subyek (Effendi, 2011). Sebagai obyek, publik menjadi target diplomasi negara, yang artinya kementerian luar negeri dan diplomat tidak hanya berurusan dengan diplomat dan pemerintah negara lain, melainkan juga publik di negara tersebut. Sedangkan sebagai subyek, publik dapat berperan untuk membantu diplomasi sebuah negara melalui aktivitasnya yang terhubung dengan masyarakat di negara lain. Meskipun peran publik dalam diplomasi telah berlangsung lama, namun diplomasi publik mulai menjadi perhatian kembali pasca peristiwa 9/11 yang memunculkan kesadaran pemerintah untuk memperhatikan publik di negara lain dalam diplomasinya (Melissen, 2005). Hal inilah yang kemudian menjadikan diplomasi publik sebagai salah satu isu politik terpenting pada abad 21 (Snow & Taylor, 2008).

Dalam perkembangannya, diplomasi publik memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar hubungan antara publik dan diplomasi. Pada awalnya diplomasi publik dikaitkan dengan propaganda, namun dalam perkembangannya, diplomasi publik berkembang melampaui propaganda itu sendiri (Melissen, 2005). Pemahaman diplomasi sebagai propaganda, yaitu usaha para diplomat untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dan biasanya dilaksanakan secara rahasia, dimaknai sebagai diplomasi publik tradisional. Sementara itu pada saat ini, diplomasi publik modern menunjukkan peran publik semakin besar dan dilaksanakan secara terbuka. Diplomasi publik saat ini tidak bersifat satu arah, dari

pemerintah atau sesuai dengan tujuan diplomasi negara, tetapi juga dua arah berupa reciprocal publik exchange untuk membangun trust building dan memiliki sisi personal dan dimensi sosial tersendiri (Snow, 2008). Dengan kata lain, diplomasi publik melibatkan kepentingan publik negara lain dan mengombinasikannya dengan kepentingan nasional sehingga membentuk suatu pandangan bersama (Leonard, Stead, & Smewing, 2002). Dalam konteks inilah, diaspora yang posisinya berada di antara negara asal dan negara penerima, dapat menjadi bagian dari diplomasi publik dalam peran mereka sebagai publik baik di negara asal maupun negara penerima.

Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik diplomasi publik yang dijalankan oleh beberapa negara berkaitan dengan diaspora mereka di luar negeri. Negara-negara Afrika menggunakan diaspora mereka di Eropa sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan (Mangala, 2016). Pemerintah India melibatkan diaspora mereka sebagai bagian dari diplomasi publik (Abraham, 2012), bahkan memasukkan diaspora sebagai bagian dari soft power India bersama dengan Buddhisme dan Yoga (Mazumdar, 2018). Tiongkok juga tidak ketinggalan untuk memasukkan diaspora sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka (Suryadinata, 2017), terlebih lagi dalam pemerintahan Presiden Xi Jinping, diaspora Tionghoa menjadi bagian dari strategi charm offensive Tiongkok (Ding, 2015). Sementara itu Filipina melihat diaspora tidak hanya memiliki peran penting dalam diplomasi publik, melainkan sebagai bentuk baru dari soft power dan merepresentasikan apa yang disebut dengan 'people-powered diplomacy' (Gonzalez, 2011). Melalui sebuah studi analisis konten terhadap berita, pidato dan informasi publik lainnya, Vanessa Bravo dan Maria De Moya melihat bahwa pemerintah El Salvador dan Kolombia menjalin hubungan dengan diaspora untuk membentuk citra yang dalam konteks diplomasi masuk di dalam diplomasi publik (Bravo & De Moya, 2015). Pemerintah Inggris menggunakan diasporanya di luar negeri, baik warga negara maupun bekas warga negara Inggris, sebagai bagian dari diplomasi publik melalui siaran BBC (Gillespie & Webb, 2017). Negara-negara penerima juga ikut melibatkan diaspora dalam diplomasi mereka terhadap negara asal atau terkait isu tertentu. Sebuah studi terhadap pemimpin diaspora Turki di Belgia, Aksak dan Molleda menunjukkan bahwa Uni Eropa berusaha untuk mendekati diaspora Turki dalam isu immigrant integration dengan membangun komunikasi dua arah (Ozdora-Aksak & Molleda, 2014). Sementara itu, diaspora Turki menggunakan kesempatan

ini untuk melakukan lobi dan berusaha mempengaruhi kebijakan publik di Uni Eropa.

Beberapa kasus di atas menunjukkan keterkaitan diaspora dengan diplomasi publik sebuah negara. Menurut Aharon Barth dan Yossi Shain, diaspora adalah aktor non negara dalam hubungan internasional (Shain & Barth, 2003). Namun, peran dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh hubungannya dengan negara asal, negara penerima dan hubungan di antara keduanya. Dengan kata lain, meskipun diaspora adalah aktor non negara, namun perannya dipengaruhi oleh aktor negara. Sementara itu, Maria Koinova berpendapat bahwa diaspora adalah aktor hubungan internasional yang otonom atau independen (Koinova, 2012, 2017, 2019). Menurut Koinova, diaspora memiliki kapasitas untuk memobilisasi kekuatan politik dan ekonomi melalui jaringan transnasionalnya. Sependapat dengan Koinova yang melihat diaspora sebagai aktor yang otonom dan independen, Elaine L. E. Ho dan Fiona McConnell mengajukan konsep 'diaspora diplomacy' (E. L. E. Ho & McConnell, 2017). Konsep ini secara khusus membahas tentang komponen diplomasi dalam hubungan antara diaspora dan negara. Dengan kata lain, konsep ini membahas tentang aktivitas diaspora yang dilakukan antar diaspora dalam jaringan transnasional atau disebut dengan polilateral diplomacy.

Gloria Totoricaguena dalam penelitiannya terhadap diaspora Basque menyebutkan bahwa diaspora dapat melakukan diplomasi secara independent karena memiliki jaringan transnasional yang memungkinkannya melakukan gerakan di luar negara asalnya (Totociraguena, 2012). Hal yang sama juga terjadi dalam konteks paradiplomasi ketika diaspora Irlandia di Argentina mampu memainkan peran sebagai aktor paradiplomasi untuk menyuarakan kepentingan daerahnya sekaligus menjembatani hubungan Irlandia dan Argentina (Cruset, 2012). Oleh karena itu, diaspora di sini berperan sebagai aktor yang menjembatani masalah domestik (terkait dengan teritorial dan kedaulatan) dan hubungan luar negeri. Konsep diaspora diplomacy ini mirip dengan pemikiran Koinova (Koinova, 2012, 2017, 2018) yang meletakkan diaspora sebagai aktor independen, diplomasi diaspora berusaha untuk menjembatani kajian hubungan internasional, diplomasi dan diaspora. Meskipun begitu, konsep ini masih menghadapi banyak tantangan karena terdapat perbedaan mendasar antara negara dan diaspora dalam konteks stateshood, sovereignty dan territory.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena melalui proses induktif (Silalahi, 2009) terhadap data non numerik untuk memami sebuah fenomena (Lamont, 2015). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan document-based yaitu dari pemberitaan di media massa, artikel jurnal dan laporan (Lamont & Boduszynski, 2020). Sementara itu, analisis konten digunakan untuk menganalisa data-data penelitian.

HASIL

Indonesia memiliki banyak warga negara atau mantan warga negara dan keturunannya di luar negeri, namun konsep diaspora relatif baru dikenal di Indonesia. Konsep diaspora Indonesia baru muncul ketika Dino Patti Djalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2010-2013) menginisiasi pertemuan diaspora Indonesia dalam Kongres Diaspora Indonesia I di Los Angeles pada tahun 2012. Sejak saat itu, diaspora Indonesia mulai berkembang dan semakin populer dengan munculnya berbagai jaringan diaspora Indonesia atau IDN (Indonesian Diaspora Network) di berbagai negara. IDN merupakan sebuah forum dan jaringan hubungan antar diaspora Indonesia dari berbagai negara. Pemerintah Indonesia menyambut baik kehadiran organisasi diaspora ini dan melihat diaspora sebagai sebuah aset penting (Harza et al., 2019).

Meskipun begitu, IDN dan pemerintah Indonesia memiliki perbedaan dalam penggunaan konsep untuk menyebut orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. IDN menggunakan istilah diaspora Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia menggunakan istilah Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN). Perbedaan istilah di antara keduanya tidak hanya berkaitan dengan penyebutan namun juga kategori orang Indonesia di luar negeri yang masuk dalam definisi kedua istilah tersebut. Berdasarkan konsep diaspora Indonesia yang diusung oleh Dino Pati Djalal, penggagas kelompok diaspora Indonesia, diaspora Indonesia adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, mantan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, warga negara asing yang merupakan mantan warga negara Indonesia atau keturunan dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan warga negara asing yang tidak memiliki hubungan darah atau keturunan dari warga negara Indonesia atau mantan warga negara Indonesia, namun memiliki kepedulian,

mencintai dan berkontribusi terhadap Indonesia (Bachtiar, 2015). Sementara itu, pemerintah Indonesia mengadopsi tiga kelompok pertama dari definisi Dino Pati Djalal, namun tidak mengakui kelompok keempat sebagai bagian dari MILN, yaitu, warga negara asing yang tidak memiliki hubungan sejarah kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu, berdasarkan tipologi migrasi internasional Indonesia, masyarakat Indonesia di luar negeri dapat dibagi menjadi empat kelompok (Naufanita, Yudono, & Soetjipto, 2018). **Pertama**, kelompok yang bermigrasi selama masa penjajahan Belanda di mana beberapa orang dari suku Jawa, Bugis dan Minang melakukan migrasi ke luar negeri karena kebijakan pemerintah kolonial. **Kedua**, pekerja migran Indonesia. **Ketiga**, kelompok elite ekspatriat atau profesional yang melakukan migrasi karena karier, pekerjaan dan pasar. Keempat, kelompok eksil yang merupakan mantan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kelompok etnis yang menjadi pengungsi selama konflik di Indonesia.

Meskipun kelompok diaspora Indonesia tampak mulai populer, namun muncul pertanyaan tentang representasi orang Indonesia di luar negeri dalam kelompok ini. Latifa mengkritik kelompok ini dalam dua hal. Pertama, representasi kelompok profesional dan pekerja migran yang tidak setara, dan kedua, IDN lebih terlihat memasarkan diaspora kepada pemerintah Indonesia (Latifa, 2019). Menurutnya, pekerja migran dan kelompok etnis tidak terlalu direpresentasi dalam IDN daripada kelompok profesional dan pekerja elite. Kemunculan IDN juga dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan neoliberalisme dengan pendekatan pasar atau dengan kata lain, terjadi komodifikasi diaspora kepada pemerintah.

Perbedaan definisi orang Indonesia di luar negeri mengakibatkan perbedaan tolak ukur dalam menghitung jumlah dan persebaran diaspora Indonesia (Muhidin & Utomo, 2015). Situasi ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa anggota diaspora Indonesia (Setijadi, 2017). Hal ini menghasilkan kurang spesifiknya penguatan dan pengembangan potensi diaspora dari pemerintah Indonesia (Risman et al., 2018). Kementerian Luar Negeri sebagai pemangku kebijakan terkait diaspora, masih memiliki permasalahan akan terbatasnya data dan dalam implementasi kebijakan diaspora. Oleh karena itu, Indonesia masih memerlukan data yang lebih lengkap tentang populasi diaspora Indonesia, termasuk penyebaran dan karakteristiknya (Romdiati, 2015).

Meskipun begitu, secara umum, diaspora Indonesia telah banyak melakukan berbagai aktivitas yang membantu pembangunan di Indonesia. Sebagai contoh, diaspora

Indonesia di Jerman dan Australia bergerak sebagai agen perubahan yang menjembatani antara stakeholder di Indonesia dan Jerman atau Australia, serta menstimulasi proses transfer pengetahuan/brain gain (Lestari, 2019), dan turut memainkan peran dalam pembangunan manusia, ekonomi, sosial, politik dan budaya (Syauta, 2014). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha membuat berbagai kebijakan diaspora pada berbagai institusi melalui beberapa regulasi dan program. Pemerintah membentuk Staf Ahli bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan MILN di Kementerian Luar Negeri (Ministry of Foreign Affairs, 2020). Terhadap pekerja migran, pemerintah Indonesia membentuk badan khusus yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pembentukan badan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan bekerja di luar negeri, menyediakan layanan penempatan pekerja migran dan perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran. Badan ini merupakan lembaga koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Dirjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM (BNP2TKI, 2011).

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan dua kebijakan terkait dengan diaspora Indonesia. Kedua kebijakan tersebut adalah Keputusan Presiden No. 76/2017 tentang Fasilitas untuk MILN dan Keputusan Menteri Luar Negeri No.7/2017 tentang Kartu MILN (Harijanti et al., 2018). Masyarakat Indonesia di luar negeri yang masih memegang kewarganegaraan Indonesia mendapatkan fasilitas dari pemerintah Indonesia untuk membuka rekening pada bank komersial di Indonesia, memiliki properti di Indonesia dan mendirikan badan usaha berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing yang memegang Kartu MILN ini mendapatkan beberapa fasilitas serupa dengan dibatasi atau merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Kebijakan Kartu MILN ini merupakan alternatif dari dwi kewarganegaraan yang tidak dianut di Indonesia (Indraswari & Aryani, 2018).

Pemerintah Indonesia menjalin komunikasi dengan diaspora Indonesia, terutama melalui Kongres Diaspora Indonesia dan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian. Pada Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2017 disebutkan bahwa Kemenlu telah menghasilkan tiga inisiatif terkait dengan pemberdayaan masyarakat

Indonesia di luar negeri (Ministry of Foreign Affairs, 2017). Ketiga inisiatif tersebut adalah pengeluaran Kartu MILN, dukungan terhadap Kongres Diaspora Indonesia, pemetaan potensi diaspora Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Aparatus dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan terhadap diaspora Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memberikan kesempatan kepada diaspora Indonesia untuk bergabung menjadi pegawai negeri (Humas Sekab, 2018). Kementerian Riset dan Teknologi mengeluarkan program World Class Professor yang bertujuan untuk membawa ilmuwan diaspora Indonesia dari berbagai negara untuk berkolaborasi dan memperkuat sinergi antara ilmuwan diaspora dan peneliti di Indonesia (Sumber Daya Iptek dan Dikti, 2019). Sejak tahun 2016 hingga 2019, terdapat lebih dari 150 peneliti diaspora Indonesia bergabung dalam program ini. Lebih jauh lagi, pada tahun 2020, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat program "Research-Innovation Collaboration Scheme for Indonesian Diaspora" yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara peneliti Indonesia dan diaspora Indonesia untuk menghasilkan inovasi penelitian dalam upaya menanggulangi wabah Covid-19 (Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, 2020).

PEMBAHASAN

Keberadaan diaspora Indonesia atau Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) menghadirkan potensi dukungan terhadap diplomasi publik di Indonesia. Potensi dukungan diaspora Indonesia terhadap diplomasi publik Indonesia dikarenakan tiga poin utama. **Pertama**, jumlah diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran memberikan potensi sendiri dalam konteks jumlah di mana pekerja migran dapat menjadi sarana diplomasi publik khususnya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di negara lain. Berdasarkan data dari UN DESA, pada tahun 2020, jumlah migran internasional Indonesia mencapai 4.601.369 orang (UN DESA, 2020). **Kedua**, kelompok diaspora Indonesia yang lain seperti kelompok profesional dan elite ekspatriat memiliki dukungan dalam konteks teknologi, pengetahuan dan ekonomi yang berpotensi menjalankan peran penting dalam menjembatani hubungan antara Indonesia dan negara tempat mereka tinggal, baik hubungan antar pemerintah (government to government) dan hubungan antar masyarakat (people to people). **Ketiga**, kelompok diaspora Indonesia memiliki jaringan yang luas dan

kuat, baik jaringan di antara mereka (intra-diaspora network) maupun jaringan antara diaspora dengan kelompok lain baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan kata lain, potensi utama dukungan diaspora terhadap diplomasi publik Indonesia adalah karena jumlah, pengetahuan dan jaringan. Selain itu, pekerja migran Indonesia juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia melalui remitansi. Hingga bulan Mei 2021, Bank Dunia mencatat remitansi dari migran internasional Indonesia mencapai 9,651 juta dolar AS atau 0,9% dari total GDP Indonesia (World Bank, 2021).

Dalam konteks pekerja migran Indonesia, beberapa studi fokus kepada pendekatan hukum dalam konteks perlindungan pekerja migran di luar negeri (Dewi, Landra, & Yasa, 2016; S. A. Manurung & Sa'adah, 2020; Natalis & Ispriyarso, 2018) dan sebagian penelitian lain menjelaskan hubungan antara pekerja migran dan diplomasi (Dharossa & Rezasyah, 2020; Paramitaningrum, Yustikaningrum, & Dewi, 2018). Meskipun begitu, penelitian-penelitian tersebut lebih melihat hubungan diplomasi dan pekerja migran dalam konteks diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sementara itu, keberadaan pekerja migran Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah peluang terhadap penguatan diplomasi Indonesia karena populasi pekerja migran Indonesia yang besar seperti di Hongkong dan Taiwan. Pekerja migran di Hongkong dan Taiwan, sering terlibat dalam berbagai kegiatan dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat setempat. Melalui berbagai kegiatan kebudayaan ini, mereka memiliki peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia, sekaligus membentuk citra (image) Indonesia kepada masyarakat di HongKong dan Taiwan dan pada akhirnya akan membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap budaya dan masyarakat Indonesia. Tentu saja, pengenalan budaya Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pekerja migran Indonesia namun masyarakat Indonesia yang lain, termasuk dalam memperkenalkan makanan Indonesia yang mendukung gastrodipomasi Indonesia (Pujayanti, 2017).

Sementara itu, peran MILN yang lain, yaitu kelompok profesional dan elite ekspatriat juga memiliki potensi dukungan terhadap diplomasi publik Indonesia dalam bidang alih teknologi, pendidikan, investasi dan perdagangan. Kelompok ini mendominasi representasi dalam IDN sehingga peran IDN lebih banyak berfungsi pada keempat potensi di atas. Para MILN yang tinggal di luar negeri, terutama di negara-negara maju memiliki keahlian yang

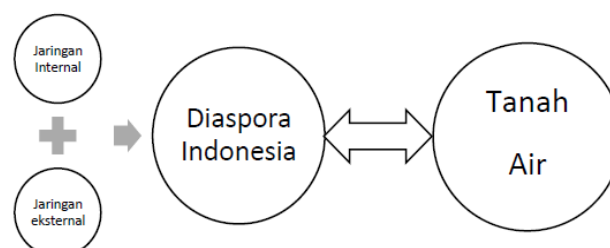
dapat digunakan untuk mendukung diplomasi publik Indonesia dalam konteks memperkenalkan Indonesia kepada komunitas masyarakat terkait dengan keahlian mereka, membangun citra tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan menjembatani hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Beberapa diaspora Indonesia dari kelompok ini, seperti para ilmuwan dan mahasiswa berperan penting dalam membangun citra tentang sumber daya manusia Indonesia melalui aktivitas pendidikan dan riset yang mereka lakukan di luar negeri. Sementara itu, tidak sedikit juga diaspora Indonesia yang berhasil membangun bisnisnya di luar negeri sehingga berperan menjembatani investasi dan perdagangan antara Indonesia dengan negara tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, potensi peran yang dapat dilakukan oleh kelompok ini adalah lebih kepada pembangunan citra dan menjembatani hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Beberapa peneliti juga menemukan potensi penting diaspora dalam mendukung diplomasi pertahanan Indonesia (Risman et al., 2018).

Selain itu, potensi dukungan diaspora Indonesia terhadap diplomasi publik juga tampak kepada kekuatan jaringan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia itu sendiri. Dengan mengambil contoh pada IDN, kita dapat melihat kuatnya jaringan antar diaspora Indonesia di luar negeri. Saat ini IDN telah memiliki 27 chapter yang tersebar di 27 negara-negara di dunia. Jaringan antar diaspora Indonesia ini dapat berfungsi untuk menjadi penggerak untuk mendukung diplomasi publik seperti mendorong keterlibatan diaspora Indonesia di berbagai negara untuk membantu pemerintah dalam memperkenalkan, menjelaskan, menjembatani sekaligus berperan aktif di dalam kegiatan diplomasi publik. Salah satu kekuatan utama diaspora adalah jaringan, baik secara kelompok maupun individual. Jaringan diaspora dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu jaringan internal dan eksternal. Jaringan internal adalah jaringan yang dimiliki oleh kelompok diaspora dimana kelompok diaspora terhubung satu sama lain dengan sesama diaspora dari Indonesia. Jaringan yang dimiliki oleh IDN merupakan salah satu contohnya. 27 chapter IDN Global yang tersebar di 27 negara membentuk jaringan yang bagus untuk saling bertukar informasi dan gagasan untuk membantu pembangunan di Indonesia. Contoh kelompok diaspora lain yang memiliki jaringan internal yang luas adalah IDN – United yang memiliki jaringan di 20 negara (IDN-U, 2020); Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia yang saat ini memiliki meliputi kawasan Amerika dan Eropa (28 PPI negara), Asia- Oceania (14 PPI negara) dan Timur

Tengah (18 PPI negara) (PPI Dunia, 2021); Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang memiliki jaringan di Amerika, Eropa, Inggris Raya, Timur Tengah dan Afrika, Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia (I-4, 2020); Indonesian Diaspora Business Council yang memiliki jaringan di Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia; Global Indonesia Professional Association yang memiliki jaringan di Asia Pasifik, Eropa dan Amerika (GIPA, 2020), dan banyak lagi kelompok-kelompok diaspora yang memiliki jaringan internal yang luas.

Sementara itu, jaringan eksternal adalah jaringan yang dibentuk oleh diaspora Indonesia dengan pihak lain di luar jaringan internal. Jaringan eksternal ini meliputi jaringan antara diaspora Indonesia dengan kelompok tertentu dan pemerintah tempat mereka tinggal, atau dengan diaspora dari negara lain. Beberapa contoh jaringan eksternal ini misalnya kerja sama antara IDN dan Nanmen Park Museum Nasional Taiwan untuk mengadakan Festival Batik (IDN Global, 2021a), jaringan yang dibangun oleh individual diaspora dengan tempat mereka bekerja di lembaga internasional seperti Asian Development Bank dan Southeast Asia Internasional Rice Research Institute (IDN Global, 2021b), kerja sama antara IDN di Belanda dan Dutchculture (DutchCulture, 2021), partnership antara IDN di Perancis dan beberapa perusahaan Perancis (IDN France, n.d.), atau jaringan yang terbentuk dari hubungan antara diaspora Muslim Indonesia dengan diaspora Muslim dari negara lain di negara yang mereka tempati (Wardana, 2015). Jaringan kedua ini sangat penting dalam membantu diplomasi publik Indonesia dalam konteks menyebarkan informasi tentang Indonesia kepada jaringan ini sekaligus juga menyampaikan informasi penting yang berpotensi mendukung diplomasi publik Indonesia.

Gambar 1. Jaringan internal dan eksternal diaspora Indonesia dan hubungannya dengan tanah air.



Dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik dan potensi dukungan diaspora terhadap diplomasi publik Indonesia, maka pemerintah Indonesia dapat

mempertimbangkan beberapa strategi dalam melibatkan diaspora Indonesia dalam diplomasi publik.

Pertama, memperluas hubungan antara pekerja migran dan diplomasi dari hubungan yang bersifat perlindungan menjadi hubungan yang bersifat pemberdayaan. Jika selama ini diplomasi Indonesia lebih banyak didominasi oleh perlindungan pekerja migran, maka diplomasi Indonesia dapat diperluas pada pemberdayaan pekerja migran Indonesia sebagai bagian dan aktor dari diplomasi publik. Beberapa kegiatan budaya yang dilakukan oleh diaspora Indonesia mendapatkan dukungan dari perwakilan pemerintah Indonesia, namun juga sebagian kegiatan lain dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, pekerja migran memiliki potensi yang sangat penting sebagai bagian dari diplomasi publik Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan sinergi dengan kegiatan pekerja migran, sekaligus menyampaikan informasi tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam diplomasi publik. Dengan kata lain edukasi atau literasi diplomasi publik menjadi penting kepada kelompok pekerja migran Indonesia.

Kedua, hubungan baik yang telah terjalin antara Kementerian Luar Negeri dan kelompok diaspora dapat ditindak lanjuti dengan pengembangan dan optimalisasi kelembagaan dengan membentuk lembaga khusus yang lebih besar untuk membantu pemberdayaan MILN dengan melibatkan diaspora di dalamnya. Pengembangan kelembagaan dengan pelibatan diaspora dan termasuk sinergi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akan membuat peran diaspora Indonesia menjadi semakin efektif, terukur dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, strategi ini juga akan membantu Kemenlu dalam memetakan potensi diaspora Indonesia sehingga peran diaspora dalam diplomasi publik dapat berjalan lebih optimal.

Pelembagaan hubungan antara pemerintah dengan diaspora adalah hal yang sangat penting. Tren dunia pun juga menunjukkan kebijakan beberapa negara yang membangun hubungan mereka dengan kelompok diaspora melalui pendirian lembaga khusus yang mengurus hubungan dengan diaspora. Hingga tahun 2012, terdapat 77 lembaga terkait diaspora di 56 negara di dunia (Agunias & Newland, 2012). Negara-negara tersebut memiliki lembaga yang berbeda-beda baik dalam konteks cakupan wilayah (nasional dan daerah) maupun struktur kelembagaan. Setidaknya terdapat enam kategori lembaga terkait diaspora: lembaga setingkat kementerian, sub-kementerian, lembaga pemerintah tingkat

nasional, lembaga pada pemerintah daerah, jaringan kekonsuleran dan lembaga semi pemerintah. Di Asia Tenggara, Filipina dan Vietnam yang juga memiliki populasi diaspora yang besar, memiliki lembaga khusus yang mengurus hubungan dengan diaspora. Filipina memiliki Commission on Filipinos Overseas (CFO) yang berada langsung di bawah kantor kepresidenan, sedangkan Vietnam memiliki National Committee for Vietnamese Living in Foreign Countries (Chan & Tran, 2011b; Commission of Filipinos Overseas, 2010). Kedua negara juga memiliki kebijakan kewarganegaraan ganda untuk diaspora mereka. Contoh lain yang dapat menjadi referensi untuk Indonesia adalah Tiongkok. Meskipun Tiongkok memiliki lembaga yang menangani hubungan dengan diasporanya, namun Tiongkok tidak menawarkan kewarganegaraan ganda. Berdasarkan tren dan pengalaman beberapa negara, kelembagaan dalam hubungan dengan diaspora adalah satu faktor yang krusial.

Ketiga, strategi diplomasi publik yang melibatkan diaspora Indonesia dapat dilakukan dengan masuk dalam jaringan internal dan eksternal diaspora. IDN yang telah memiliki jaringan internal yang kuat, dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan sekaligus memberikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat negara lain. Strategi diplomasi publik yang dapat dilakukan adalah menyusun sebuah rancangan pedoman diplomasi publik yang dapat dilakukan oleh diaspora Indonesia dalam jaringan internal dan eksternal mereka. Secara internal, pedoman ini dapat membantu diaspora Indonesia untuk menyusun sebuah gerakan bersama yang relatif besar, luas dan masif untuk mendukung diplomasi publik Indonesia. Sementara itu dalam konteks jaringan eksternal, pedoman ini akan memberikan arahan kepada diaspora untuk berperan sebagai aktor dalam diplomasi publik Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah tempat mereka tinggal.

KESIMPULAN

Keberadaan diaspora Indonesia atau Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) memiliki kompleksitas tersendiri. Selain memiliki potensi yang besar, mereka juga memiliki potensi masalah sendiri. Disisi lain, konsep diaspora yang relatif baru di Indonesia juga membawa dampak kepada pemahaman pemerintah terhadap diaspora yang berbeda dengan kelompok diaspora Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk merespons keberadaan diaspora Indonesia melalui berbagai kebijakan dan

program.

Diaspora Indonesia dan MILN memiliki potensi yang besar dalam diplomasi publik. Mereka bahkan telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dan mendukung diplomasi publik Indonesia. Hal ini tentu saja memberikan sinyal yang baik dalam konteks kepedulian dalam memperkenalkan budaya dan masyarakat Indonesia serta meningkatkan saling pemahaman antar masyarakat. Meskipun begitu, literasi tentang diplomasi publik masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab bersama untuk mendukung diplomasi publik Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan diaspora Indonesia perlu ditingkatkan baik dalam konteks pemahaman, program dan penguatan jaringan. Dalam konteks pemahaman, terutama terhadap pekerja migran, perluasan strategi diplomasi dari perlindungan kepada pemberdayaan keterlibatan diaspora Indonesia dalam diplomasi publik menjadi penting untuk dilakukan. Dalam strategi perluasan diplomasi ini diperlukan usaha untuk lebih dekat kepada kelompok-kelompok dan komunitas pekerja migran Indonesia. Sementara itu, strategi diplomasi publik yang lain adalah terkait dengan penguatan kelembagaan melalui optimalisasi lembaga pemerintah, dalam ini Kementerian Luar Negeri, yang terkait dengan diaspora. Semakin besarnya jumlah dan potensi diaspora Indonesia membuat kebutuhan akan lembaga yang secara khusus menangani hubungan pemerintah dan diaspora menjadi penting. Lembaga ini sangat penting untuk menyusun, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan terutama dalam konteks diplomasi publik.

Terakhir, keberadaan pedoman peran diaspora Indonesia dalam diplomasi publik juga penting untuk disusun sehingga diaspora Indonesia dapat memahami posisi dan perannya dalam diplomasi publik. Sudah banyak kegiatan dan program yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang secara tidak langsung mendukung dan terkait dengan diplomasi publik Indonesia. Penyusunan pedoman diplomasi publik untuk diaspora akan lebih meningkatkan kesadaran mereka untuk terlibat lebih aktif lagi dalam diplomasi publik Indonesia di luar negeri. Terlebih lagi, diaspora Indonesia memiliki potensi besar dalam konteks jaringan internal dan eksternal. Penelitian lebih lanjut tentang desain, mekanisme, praktik dan pola hubungan dalam kedua jaringan tersebut akan menjadi satu kajian yang menarik bagi penelitian dimasa depan.

ACKNOWLEDGEMENT

Artikel ini adalah bagian dari penelitian yang dibiayai oleh Program Blockgrant Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, TA. 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, R. (2012). India and its Diaspora in the Arab Gulf Countries: Tapping into Effective 'Soft Power' and Related Public Diplomacy. *Diaspora Studies*, 5(2), 124–146. <https://doi.org/10.1080/09739572.2013.807544>
- admin, admin, & Shinta, A. (2019). Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukkseskan Pemilihan Umum . *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7(1), 4–15. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/13>
- Agunias, D. R., & Newland, K. (2012). *Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries*. Geneva and New York: International Organization for Migration and Migration Policy Institute.
- Aidulsyah, F., & Gusnelly, G. (2019). Mapping Indonesian Muslim Diaspora in the Netherlands. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9(2), 157–166. <https://doi.org/10.14203/JISSH.V9I2.150>
- Andayani, L. (2020). Indonesian Diaspora Empowerment: A Concept in Strengthening Diplomacy for National Defense *Jurnal Pertahanan*, 6(1), 105–117. <https://doi.org/10.33172/JP.V6I1.731>
- Bachtiar, I. (2015). *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeri*. Jakarta: Kompas.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik. (2020). *Lirik Potensi Diaspora, Kemenristek/BRIN Luncurkan Skema Khusus untuk Mendukung Penangan Pandemi COvid-19*.
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2018). *Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics*. London: Routledge.
- BNP2TKI. (2011). *Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI*.
- Bravo, V., & De Moya, M. (2015). Communicating the Homeland's Relationship with its Diaspora Community: The Cases of El Salvador and Colombia. *The Hague Journal of Diplomacy*, 10(1), 70–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/1871191X-12341281>
- Brazier, J. E. (2008). *Diaspora: An Introduction*. Oxford: Longman Publishing.
- Camroux, D. (2008). *Nationalizing Transnationalism? The Philippine State and the Filipino Diaspora* (No. 152). Paris.
- Castells, M. (1997). *The Information Age: Economy, Society and Culture, The Power of Identity, Volume II*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Chan, Y. W., & Tran, T. L. T. (2011a). Recycling Migration and Changing Nationalisms: The Vietnamese Return Diaspora and Reconstruction of Vietnamese Nationhood. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 37(7), 1101–1117. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.572486>
- Chan, Y. W., & Tran, T. L. T. (2011b). Recycling Migration and Changing Nationalisms: The

- Vietnamese Return Diaspora and Reconstruction of Vietnamese Nationhood.
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.572486>, 37(7), 1101–1117.
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.572486>
- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809–827. <https://doi.org/10.31078/JK1346>
- Commission of Filipinos Overseas. (2010). *Handbook for Filipinos Overseas* (Eight Edit). Manila: Office of the President of the Philippines, Commission on Filipinos Overseas.
- Cruset, M. E. (2012). Peace and Reconciliation in Northern Ireland: The Role of Diaspora. In M. E. Cruset (Ed.), *Migration and New International Actor* (pp. 153–). New Castle: Cambridge Scholar Publishing.
- Daniel, Y. (2005). Dance in the African Diaspora. In M. Ember, C. R. Ember, & I. Skoggard (Eds.), *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World* (pp. 347–356). https://doi.org/10.1007/978-0-387-29904-4_34
- Dewansyah, B. (2018). Indonesian Diaspora movement and citizenship law reform: towards 'semi-dual citizenship'*. *New Pub: Brill Publishers*, 12(1), 52–63.
<https://doi.org/10.1080/09739572.2018.1538688>
- Dewansyah, B. (2021). From 'political to social' role: The shifting strategy of Indonesian diaspora movement on development. In A. K. Sahoo (Ed.), *Routledge Handbook of Asian Diaspora and Development* (pp. 288–300).
<https://doi.org/10.4324/9780429352768-26>
- Dewi, A. A. A. C., Landra, P. T. C., & Yasa, M. M. (2016). Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomati Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Kertha Negara*, 4(1), 1–7.
- Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 105–118.
- Diahtantri, P. I., Fathun, L. M., & Ma'arif, D. (2021). Strategi Gastrodiplomasi Indonesia melalui Co-Branding Diaspora di Australia Tahun 2018–2020. *Journal of International Relations*, 1(001), 52–63. Retrieved from <https://unimuda.e-journal.id/jurnalhubunganinternasional/article/view/1514>
- Ding, S. (2015). Engaging Diaspora via Charm Offensive and Indigenised Communication: An Analysis of China's Diaspora Engagement Policies in the Xi Era. *Politics*, 35(3–4), 230–244. <https://doi.org/10.1111/1467-9256.12087>
- Djuwita, A. (2020). Keterlibatan Diaspora Indonesia untuk Pemasaran Obyek Wisata Kota Bandung. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.35760/MKM.2020.V4I1.2491>
- Dufoix, S. (2019). Diaspora Before It Became a Concept. In R. Cohen & C. Fischer (Eds.), *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (p. 17). New York: Routledge.
- DutchCulture. (2021). Indonesian Diaspora Network Netherlands | DutchCulture | Centre for international cooperation. Retrieved November 3, 2021, from DutchCulture website: <https://dutchculture.nl/en/organisation/indonesian-diaspora-network-netherlands>
- Effendi, T. D. (2011). *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Ghalia.
- Effendi, T. D. (2016). The Roles of Diaspora Community in Indonesia-Taiwan Relations. *International Journal of International Relations, Media and Mass Communication Studies*, 2(4), 25–36.
- Effendi, T. D. (2021). Long-distance Democracy and Political Parties in the Indonesian

- Overseas Elections TT - Long- distance Democracy and Political Parties in the Indonesian Overseas Elections. *Journal of Global and Area Studies(JGA)*, 5(1), 149–171. Retrieved from http://kiss.kstudy.com/search/detail_page.asp?key=3892926
- Faist, T. (2010). Diaspora and transnationalism: What kind of dance partners? In R. Bauböck & T. Faist (Eds.), *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods* (pp. 9–34). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Gillespie, M., & Webb, A. (2017). *Diaspora and Diplomacy: Cosmopolitan Contact Zones at The BBC World Service (1932- 2012)*. Oxon: Routledge.
- GIPA. (2020). Global Indonesia Professionals' Association | GIPA. Retrieved November 3, 2021, from Global Indonesia Professional Association website: <https://gipa.co/>
- Gonzalez, J. J. I. (2011). *Diaspora Diplomacy: Philippine Migration and Its Soft Power Influence*. Minneapolis: Mill CityPress, Inc.
- Gustina, & Prawira, M. R. (2020). Pengaruh Diaspora Bugis Makassar di Malaysia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 1(1), 1–26. Retrieved from <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/view/378>
- Hamilton, K., & Langhorne, R. (2011). *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration* (2nd editio). New York: Routledge.
- Harijanti, S. D., Dewansyah, B., Abdurahman, A., & Dramanda, W. (2018). Citizenship and the Indonesian Diaspora: Lessons from the South Korean and Indian Experiences. *BORDER CROSSING*, 8(2), 297–310. <https://doi.org/10.33182/bc.v8i2.447>
- Harris, M. D. (2005). Art of the African Diaspora. In M. Ember, C. R. Ember, & I. Skoggard (Eds.), *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World* (pp. 329–340). https://doi.org/10.1007/978-0-387-29904-4_32
- Harza, Z., Nanda, B. J., Dermawan, R., & Permata, I. M. (2019). Indonesia in Japan Rearranges Indonesian Nation through The Diaspora Experience Perspective. In *The International Conference on ASEAN 2019* (pp. 531–535). <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9783110678666-070>
- Helly, D. (2006). Diaspora: History of an idea. In *Muslim Diaspora: Gender, Culture and Identity* (pp. 1–20). London: Routledge.
- Hill, D. R. (2005). Music of the African Diaspora in the Americas. In M. Ember, C. R. Ember, & I. Skoggard (Eds.), *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World* (pp. 363–373). https://doi.org/10.1007/978-0-387-29904-4_36
- Ho, E. L. E., & McConnell, F. (2017). Conceptualizing 'diaspora diplomacy': Territory and populations betwixt the domestic and foreign. *Progress in Human Geography*, 43(2), 235–255. <https://doi.org/10.1177/0309132517740217>
- Ho, N. T. T., Seet, P.-S., Jones, J. T., & Hoang, H. T. (2018). Managing the Re-Entry Process of Returnee Government Scholars in an Emerging Transition Economy – An Embeddedness Perspective. *Australian Journal of Public Administration*, 77(2), 154–171. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12284>
- Humas Sekab. (2018). Menteri PANRB: Profesional, Diaspora, Hingga Tenaga Honorer Berpeluang Jadi P3K.
- I-4. (2020). Profil Organisasi - i4indonesia. Retrieved November 3, 2021, from Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional website: <https://i4indonesia.org/profil/>
- IDN-U. (2020). Indonesian Diaspora Network-United | Diaspora. Retrieved November 3, 2021, from Indonesian Diaspora Network - United website: <https://www.idn-united.net/>

- IDN France. (n.d.). Company – IDN France. Retrieved November 3, 2021, from IDN France website: <https://indonesiandiasporanetwork.com/category/partner/company/>
- IDN Global. (2021a). Festival Batik dan Ikat 2021 di Taiwan. Retrieved November 3, 2021, from Indonesian Diaspora Network Global website: <http://www.diasporaindonesia.org/news/festival-batik-dan-ikat-2021-di-taiwan>
- IDN Global. (2021b). Kiat untuk Bisa Bekerja di Lembaga Internasional. Retrieved November 3, 2021, from Indonesian Diaspora Network Global website: <http://www.diasporaindonesia.org/news/kiat-untuk-bisa-bekerja-di-lembaga-internasional-4fc412a3-be67-4bc9-873f-002f30f63d8c>
- Indraswari, R., & Aryani, N. M. (2018). The Diaspora Project on Education Sector: Cultivating Positive Perception of Indonesia Through International Education. *Udayana Journal Law and Culture*, 3(2), 123–140. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/issue/view/3223>
- Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97–108. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2017.V11.97-108>
- Kenny, K. (2013). *Diaspora: A Very Short Introduction* (Oxford Uni). Oxford.
- Kim, C. (2005). Literature of the Korean Diaspora in Japan. In M. Ember, C. R. Ember, & I. Skoggard (Eds.), *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World* (pp. 356–363). https://doi.org/10.1007/978-0-387-29904-4_35
- Koinova, M. (2012). Autonomy and Positionality in Diaspora Politics. *International Political Sociology*, 6(1), 99–103. https://doi.org/doi:10.1111/j.1749-5687.2011.00152_3.x/abstract
- Koinova, M. (2017). Beyond Statist Paradigms: Sociospatial Positionality and Diaspora Mobilization in International Relations. *International Studies Review*, 19, 597–621. <https://doi.org/doi:10.1093/isr/vix015>
- Koinova, M. (2018). Sending States and Diaspora Positionality in International Relations. *International Political Sociology*, 0, 1–21. <https://doi.org/doi:10.1093/ips/oly008>
- Koinova, M. (2019). Diaspora coalition-building for genocide recognition: Armenians, Assyrians and Kurds. *Ethnic and Racial Studies*, 1890–1910. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1572908>
- Kurniawan, A. A., & Hartoni, N. A. (2019). Upaya Diaspora Indonesia di Amerika dalam Minangkabau Brand Awardnessfood Festival. *Mandala, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(2), 205–221. <https://doi.org/10.33822/MJIHI.V2I2.1329>
- Lahneman, W. J. (2005). Impact of Diaspora Communities on National and Global Politics Report on Survey of the Literature. Retrieved from https://cisssm.umd.edu/sites/default/files/2019-08/lahneman_diaspora_report.pdf
- Lamont, C. K. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications.
- Lamont, C. K., & Boduszynski, M. P. (2020). *Research Methods in Politics and International Relations*. New York: SAGE Publications Ltd.
- Latifa, I. (2019). Neoliberalism and Reconfiguration of the Diaspora in Contemporary Indonesia. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17510/paradigma.v9i1.267>
- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). *Public Diplomacy*. London: Foreign Policy Centre.

- Lestari, H. D. (2019). Involvement of Indonesian diaspora to improve standard of living of orphan in Makassar-South Sulawesi.
- Liberatore, G., & Fesenmyer, L. (2019). Diaspora and Religion: Connecting and Disconnecting. In R. Cohen & C. Fischer (Eds.), *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (pp. 233–240). New York: Routledge.
- Low, J., & Bowden, G. L. (2013). *The Chicago School Diaspora: Epistemology and Substance*. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Mackerras, C., & Maidment, R. (1998). *Culture and Society in the Asia-Pacific* (1st Editio). London: Routledge.
- Mangala, J. R. (2016). The African Union's diaspora diplomacy and policymaking: Operationalizing the migration– development nexus. *The Journal of the Middle East and Africa*, 7(2), 175–206. <https://doi.org/10.1080/21520844.2016.1193686>
- Manurung, H. (2015). Securing Southeast Asian Regional Security: Indonesia Diaspora. *University of Wahid Hasyim*, 1(1), 24–38. Retrieved from <https://papers.ssrn.com/abstract=2781814>
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–11.
- Martin, S. (2014). Indonesian Hadhramis and the Hadhramaut: An Old Diaspora and its New Connections. *Antropologi Indonesia*, 29(2). <https://doi.org/10.7454/AI.V29I2.3531>
- Mazumdar, A. (2018). India's Soft Power Diplomacy under the Modi Administration: Buddhism, Diaspora and Yoga. *Asian Affairs*, 49(3), 468–491. <https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1487696>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ministry of Foreign Affairs. (2017). *Laporan Kinerja Tahun 2017*. Jakarta.
- Ministry of Foreign Affairs. (2020). *Advisor to the Minister on Socio, Culture and Indonesian Overseas*.
- Moghissi, H. (2006). *Muslim Diaspora: Gender, Culture and Identity*. Oxon: Routledge.
- Muhidin, S., & Utomo, A. (2015). Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they? 3(2), 93–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/jas.v3i2.847>
- Mundayat, A. A. (2016). Indonesia-Malaysia Cultural Network of Minangkabay Diaspora: A Preliminary Finding. *Jurnal Melayu*, 15(2), 2016. Retrieved from <http://ejournal.ukm.my/jmelayu/article/view/16191>
- Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(2), 109–123.
- Naufanita, H., Yudono, R. M., & Soetjipto, A. (2018). Discourse Analysis of Indonesian Diaspora: Conceptual Review in International Relations. *Jurnal Kajian Wilayah*, 9, 90–108.
- Ozdora-Aksak, E., & Molleda, J.-C. (2014). Immigrant Integration Through Public Relations and Public Diplomacy: An Analysis of the Turkish Diaspora in the Capital of the European Union. *Turkish Studies*, 15(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/14683849.2014.926235>
- Paramitaningrum, Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *GLobal Strategis*, 12(1), 17– 37.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37>
- PPI Dunia. (2021). 3 Daerah Kawasan PPI Dunia. Retrieved November 3, 2021, from Persatuan Pelajar Indonesia website: <https://ppi.id/>
- Pujayanti, A. (2017). Gastrodiplomasi-Upaya Memperkuat Diplomasi Indonesia. *Politica*, 8(1), 38–56.
- Putri, R. G. (2017). Peran Diaspora Indonesia-Filipina Selatan (DIFS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Warga Keturunan Indonesia Pemikum (WKIP) di Filipina Selatan. *JISIP-UNJA*, 1(1), 1–16. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7162>
- Ramadhan, & Khusairi. (2021). Gastrodiplomasi sebagai sebuah Strategi Indonesia dalam Memperkenalkan Budaya Kulinier di Perancis. *Global and Policy Journal of International Relations*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2345>
- Revindo, M. D., Indrawati, S. M., & Hambali, S. (2019). The Role of Networking in the Internationalization of Indonesian SMEs. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(2), 421–445. <https://doi.org/10.15294/JEJAK.V12I2.21821>
- Risman, H., Sumertha, G., & Widodo, P. (2018). Strategic Policy of Indonesian Diaspora Empowerment for National. *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 4(2), 37–58.
- Riyani, T., & Hanita, M. (2020). The strategic roles of Indonesian diaspora scientists for domestic knowledge development. *Managing Learning Organization in Industry 4.0*, 131–135. <https://doi.org/10.1201/9781003010814-23>
- Romdiati, H. (2015). Globalization of Migration and The Role of Diaspora: A Literature Review. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89–100.
- Rumetor, M. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia menurut Hukum Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(2). <https://doi.org/10.35796/LES.V7I2.24652>
- Setijadi, C. (2017). Harnessing the potential of the Indonesian diaspora. *Research Collection School of Social Science, Paper2888*, 1–28.
- Shain, Y., & Barth, A. (2003). Diasporas and International Relations Theory. *International Organization*, 57(3), 449–479. <https://doi.org/10.1017/s0020818303573015>
- Silalahi, U. T. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Snow, N. (2008). Rethinking Public Diplomacy. In N. Snow & P. M. Taylor (Eds.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (pp. 3–11). <https://doi.org/10.4324/9780203891520.ch1>
- Snow, N., & Taylor, P. M. (2008). *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York: Routledge.
- Sumber Daya Iptek dan Dikti. (2019). *Tentang Program World Class Professor*.
- Suryadinata, L. (2017). *The Rise of China and The Chinese Overseas: A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond*. Singapore: ISEAS.
- Sutantri, S. C. (2018). Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Proses Pengusulan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V8I1.876>
- Syauta, R. E. (2014). *The Roles of Indonesian Diaspora as Agents of Development for their Homeland: Study case Indonesian Diaspora in Australia (2010–2013)*. President University.
- The Prime Minister of Government. (2004). Decision No. 110/2004/QD-TTg of June 23, 2004 Promulgating The Government's Action Program for Implementation of The Politburo's Resoluntion No. 36-NQ/TW of March 26, 2004 On Overseas Vietnamese.

- Totociraguena, G. (2012). Non-State Multilevel Diplomacy and The Basque Diaspora. In *Migration and New International Actor: An Old Phenomenon Seen With New Eyes* (pp. 5–16). New Castle: Cambridge Scholar Publishing.
- UN DESA. (2020). International Migrant Stock 2020: Origin. Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>
- Wardana, A. (2015). Encountering Muslim 'Others': Indonesians in the Muslim Diaspora of London. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6(2), 197–211. <https://doi.org/10.15294/KOMUNITAS.V6I2.3078>
- Wibisono, M., Legionosuko, T., & Yuninda, E. (2018). Peran Diaspora Indonesia Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus Diaspora Indonesia di Belgia). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(3). Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/185>
- Wibowo, A. S. (2015). Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 2(1), 14–30. <https://doi.org/10.25077/AJIS.2.1.14-30.2013>
- World Bank. (2021). Migration and Remittances and Data. <https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data>
- Zeraoui, Z. (2012). Arabs and Muslims in Mexico: Paradiplomacy of Informal Lobby? In *Migration and New International Actor: An Old Phenomenon Seen With New Eyes* (pp. 51–90). New Castle: Cambridge Scholar Publishing.